

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Berakhirnya masa jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 9 Oktober 2008, membuat berbagai pihak untuk mendesak Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY agar segera disahkan. Kondisi tersebut mengarah pada eksistensi status hukum keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada periode masa jabatan sebelumnya, permasalahan yang sama telah muncul, namun karena jabatan publik Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dapat dijabat dua kali, maka Sultan HB X dan Paku Alam IX tetap bertahan pada posisinya.

Pada tahun 2008 ini, gejolak mengenai eksistensi Gubernur dan Wagub DIY kembali muncul. Berbagai gelombang pergerakan masyarakat terus turun ke jalan dan terpusat di Gedung DPRD DIY dan kelompok atau golongan tersebut merupakan pendukung yang ingin menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk ketiga kalinya.

Perjuangan tersebut harus melalui jalan yang terjal karena secara legalitas hukum, maksimal jabatan publik nomer satu dan dua di sebuah propinsi hanya diperkenankan dua kali periode, sedangkan dalam Undang-

Undang pembentukan DIY, kedudukan Sultan dan Paku Alam bersifat tetap sebagai dwi tunggal.

Dengan kerancuan tersebut, kemudian muncul beragam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY dari berbagai pihak, di antaranya dari Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) UGM, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilihan Propinsi DIY, dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi DIY.

Jika dirunut dari belakang hingga sebelum reformasi terjadi pada tahun 1998, era Orde Baru milik Presiden Soeharto secara sengaja memunculkan otonomi daerah untuk menekan berbagai hak keistimewaan DIY dan hanya menjadi nama tanpa kuasa khusus di dalamnya. Pasca Orba, berbagai kalangan sudah berani untuk memmuskan keistimewaan DIY.

Dari sekian banyak lembaga pers yang ada, pemberitaan mengenai perkembangan dan sepaik terjang perjuangan Keistimewaan DIY lebih banyak diekspos oleh media massa lokal. Walaupun nilainya bersifat kedaerahan, namun karena memerlukan keputusan dari DPR RI dan Pemerintah Indonesia Bersatu, bahkan koran nasional pun tidak kalah dalam mengembangkan isu di Jakarta.

Beberapa media yang terus mengikuti perkembangan isu Keistimewaan DIY di antaranya adalah Harian Kompas Jateng-DIY, Harian Kedaulatan Rakyat, Harian Bernas, Harian Jawa Pos Radar Jogja, Harian Seputar Indonesia (SINDO) dan Koran Tempo.

Dengan melihat kedekatan pembacanya, isu yang bersifat kedaerahan hingga berbagai ulasan dari para tokoh yang memiliki kapabilitas di dalamnya, maka menjadi suatu hal menarik dan terus diikuti oleh para pembacanya.

Jika selama ini jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masih bersifat penetapan dan melekat pada Kasultanan serta Pakulaman Yogyakarta, namun nampaknya Pemerintah Pusat memiliki pemikiran tersendiri dengan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B Amandemen 4 Tahun 2002 bahwa satuan Pemerintah Daerah yang bersifat istimewa.

Pengakuan terhadap daerah yang bersifat khusus atau istimewa ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 pasal 226 ayat 1 serta 2 yang menyatakan bahwa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimungkinkan diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri.

Adanya pengakuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut, secara otomatis melimpahkan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Pola kepemimpinan di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut melekat sejak Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dan kemudian terus bergulir pada Raja Keraton dan Pakualam yang bertahta saat ini.

Walaupun sifatnya melekat, namun bukan berarti proses demokrasi lalu terbenam begitu saja, terlihat pada proses perwakilan masyarakat yang terwadah dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Disinilah kemudian lahir dinamika politik dan sosial Yogyakarta yang begitu dinamis bahkan atas keterbukaan dan keterwakilan rakyat dalam partai politik terakomodir.

Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam sepanjang sejarah Nagari Ngayogyakarta sebagai sesuatu yang menonjol kemudian menjadi kontraproduktif dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4 bahwa Kepala Pemerintahan untuk Propinsi, Kabupaten dan Kota harus dipilih secara demokratis.

Dalam konteks ini, penulis ingin secara khusus meneliti tentang perhatian media massa lokal terhadap isu penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Dalam hal ini, penulis akan mengamati soal isi berita mengenai kepastian hukum Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang dimuat oleh Harlan Radar Jogja periode 1 September hingga 31 Oktober 2008.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah *bagaimana kecenderungan isi berita Harian Radar Jogja Jawa Pos tentang proses*

pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada edisi 1 September hingga 31 Oktober 2008 ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diajukan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kecenderungan dalam proses mengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di DIY di surat kabar Radar Jogja.

2. Manfaat Penelitian

Dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian berikutnya mengenai proses pengisian jabatan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX.

D. KERANGKA TEORI

Adanya interaksi atau imbal balik antara satu pihak dengan pihak lain yang diikuti penyampaian pesan secara berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu merupakan gambaran umum sebuah komunikasi dengan prosesnya. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk

mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media.

Definisi tersebut tersimpul tujuan, yakni memberi tahu atau mengubah sikap (*attitude*), pendapat (*opinion*), atau perilaku (*behavior*). (Effendy. 1986: 5)

Dengan adanya komunikasi, maka pertukaran pesan dan simbol berlangsung dan lebih umum dikenal dengan istilah interaksi sosial. Menurut Suryono Sukanto (1986:54), ada dua syarat interaksi sosial, yaitu adanya kontak sosial manusia dan adanya komunikasi.

Kontak sosial berarti terdapatnya hubungan antar manusia, tapi hubungan badaniah saja bukan syarat mutlak terjadinya kontak sosial.

Dalam kontak sosial tersebut, tentunya muncul pesan baik dari penyampai maupun penerimanya sehingga komunikasi menunjukkan adanya sebuah pesan, sebuah hubungan antara pengirim dan penerima, sebuah efek, kontak dimana komunikasi tersebut berlangsung dan sebuah lingkup sesuatu yang disebut pesan (Alex Ibnu M., 1994:36).

David K. Berlo (dalam Asnawi Muraini, dkk. 1998 : 36) juga mengungkapkan sebuah model komunikasi pada tahun 1960. Model dari Berlo ini dikenal dengan model SMCR, kepanjangan dari *Source* (suara), *Messege* (pesan), *Channel* (saluran), dan *Receiver* (penerima).

Sebagaimana yang dikemukakan Berlo, sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seseorang maupun kelompok. Pesan adalah

terjemahan gagasan kedalam suatu kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat.

Saluran adalah medium yang membawa pesan, dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran. Jika memang informasi atau pesan tersebut ingin disampaikan secara massal, tentunya melibatkan peran teknologi di dalamnya.

Selama ini, komunikasi antar individu atau komunikasi personal bersifat terbatas, namun dengan komunikasi massa maka pesan yang ingin disampaikan, menjadi lebih luas pada waktu yang bersamaan.

Denis McQuail (1994:7), yang menjabarkan komunikasi massa sebagai suatu proses komunikasi yang berlangsung pada peringkat masyarakat luas, yang identifikasinya ditentukan oleh ciri khas institusionalnya (gabungan antara tujuan, organisasi dan kegiatan yang sebenarnya).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Onong U Effendy (1986: 61) yang mengungkapkan bahwa komunikasi massa di sini ialah komunikasi melalui media massa modern, yang meliputi surat kabar yang mempunyai sirkulasi yang luas, siaran radio dan televisi yang ditunjukkan kepada umum, dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop.

Pesan yang sampai kepada khalayak kemudian disebut sebagai berita. Hanif Suranto dan Dicky Lopullan (2002: 7) mendefinisikan berita sebagai informasi hangat yang disajikan kepada umum mengenai apa

yang sedang terjadi sehingga berita merupakan sesuatu yang menarik perhatian sebagian besar komunitas mengenai peristiwa atau ide-ide yang mempengaruhi kehidupan manusia.

Ana Nadya Abrar (1995:2) menjelaskan bahwa sesungguhnya berita adalah hasil rekonstruksi tertulis dari realitas sosial yang terdapat dalam kehidupan. Itulah sebabnya ada orang yang membuat anggapan bahwa penulisan berita lebih merupakan pekerjaan merekonstruksikan realitas sosial ketimbang gambaran dari realitas itu sendiri.

F Rachmadi (1990:3) menjelaskan dalam sejarah media massa, medium komunikasi massa yang paling tua usianya adalah surat kabar, menyusul radio, televisi dan film. Lahirnya surat kabar karena kebutuhan manusia akan berita yang aktual. Namun dalam skripsi ini, penulis memilih menggunakan surat kabar dan mampu mencerminkan aktualitas isu dengan masyarakat setempat.

Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan, dan sebagainya yang lebih dikenal sebagai media cetak. (Rahmadi. 1990 : 10)

Onong U. Effendy (1986: 119-121) menyebutkan ciri-ciri pers, yaitu:

1. **Publisitas**, adalah penyebaran kepada publik atau khalayak.

Karena diperuntukkan khalayak, maka sifat surat kabar adalah umum. Isi surat kabar terdiri dari berbagai hal yang erat kaitannya dengan kepentingan umum.

3. **Periodisitas**, adalah keteraturan terbitnya. Bisa satu kali sehari dan kali sehari atau dua kali seminggu.
4. **Universalis**, adalah kesemestaan isinya, aneka ragam dan dari seluruh dunia.
5. **Aktualitas**, adalah mengenai berita yang disiarkannya. Aktualitas sebagai ciri surat kabar adalah kecepatan laporan tanpa mengesampingkan pentingnya kebenaran cerita.

Untuk memperkuat nilai sebuah berita, maka harus mengandung satu atau beberapa unsur di dalamnya. Hanif Suranto dan Dicky Lopulalan (2002:9-10) menyebutkan, ada 8 unsur:

1. *Timeliness*. Waktu merupakan nilai berita yang sangat penting. Berita adalah sekarang. Berita adalah sesuatu yang baru, sedang berlangsung dan seringkali adalah kelanjutan dari hari ini atau saat sebelumnya.
2. *Significance*. Berkaitan dengan kejadian yang berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau kejadian yang mempunyai akibat terhadap kehidupan pembaca.
3. *Magnitude*. Kejadian yang berkaitan dengan hal-hal besar secara kuantitatif, yang berarti bagi kehidupan manusia, akan menarik dan menggugah rasa ingin tahu pembaca.
4. *The Unusual*. Berita adalah keanehan. Kejadian yang tidak lazim adalah berita besar .
5. *Conflict*. Perang, perkelahian, pergulatan dalam bidang politik,

bisnis, olahraga bahkan cinta sangat menarik minat pembaca.

6. *Proximity*. Kejadian yang dekat dengan pembaca akan menarik perhatian pembaca. Kejadian yang dimaksud bisa bersifat geografis maupun emosional.

7. *Prominence*. Hal-hal yang terkenal atau sangat dikenal pembaca, seperti orang, beda, atau tempat, memiliki nilai tinggi.

8. *Human Interest*. Kejadian yang memberi sentuhan perasaan bagi pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi yang sangat luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa, menarik perhatian pembaca.

Setelah mengandung satu atau beberapa unsur di dalamnya, tentu penyajian atau kemasan juga menjadi salah satu pemikiran yang perlu dikaji oleh wartawan atau redaksi sebelum muncul dalam surat kabar. Ana Nadya Abrar (1995: 41-42) dalam bukunya menyebutkan bahwa secara umum terdapat tiga ragam berita, yaitu: berita langsung (*straight news*), berita ringan (*soft news*) dan berita kisah (*feature*).

Mau tidak mau, pengumpulan alat bukti atau fakta-fakta di lapangan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wartawan dalam melihat peristiwa tersebut secara langsung atau menelusuri peristiwa yang pernah terjadi dengan memperkaya narasumber dan informasi penunjang dari pihak lain.

Hanif Suratno dan Dick Lopulalan (2002: 13) menjelaskan bahwa teknik mengumpulkan data tersebut, ada tiga cara: pengamatan (*observasi*), wawancara dan riset media. Ketiganya dapat digunakan atau hanya memilih salah satunya, tentunya dengan dukungan narasumber sebagai informan yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam peristiwa tertentu.

Maryono Basuki (dalam Abrar. 1995:6-70) menyebutkan, unsur-unsur yang terkandung dalam berita, yaitu:

1. *Headline*. Judul yang kemudian disusul dengan anak judul atau sub judul. Anak judul sendiri, membantu pembaca agar segera mengetahui peristiwa yang akan diberitakan.
2. *Dateline*. Ada yang terdiri atas nama media, tempat kejadian dan tanggal kejadian. Ada pula yang terdiri atas nama media massa dan tempat kejadian.
3. *Lead*. Biasanya ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Ia merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah berita, yang menentukan apakah isi berita akan dibaca atau tidak.
4. *Body*. Isinya menceritakan peristiwa yang dilaporkan dalam masa yang singkat, padat dan jelas. Dengan demikian, body merupakan perkembangan berita.

Tak dapat dipungkiri bahwa semua berita yang telah memiliki unsur dan nilai berita di mata redaksi, kemudian tidak serta-merta mampu

muncul dalam sebuah edisi surat kabar yang akan terbit esok harinya. Selain keterbatasan kolom atau *space* dalam setiap halamannya, kepentingan manajemen nampaknya memberikan sumbangsih yang besar dan mampu menekuk lutut redaksional untuk tidak menampilkan berita tertentu karena mampu mempengaruhi financial dan efek domino pada klien surat kabar tersebut.

Sehingga dalam dunia media massa, selalu ada tarik menarik antara dua kebijakan dalam perusahaan, yaitu kebijakan redaksional dan kebijakan manajemen. Kebijakan redaksional merupakan sisi idealisme pers, sedangkan kebijakan manajemen menggambarkan sisi komersialisme suatu lembaga pers yang mampu mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan media massa.

Redaksional tidak dapat memungkiri bagaimana peran penting yang dimiliki oleh kebijakan manajemen sehingga sudah menjadi rahasia umum ketika suatu berita menjadi lunak atau kehilangan sisi kritisnya setelah mendapatkan campur-tangan dari manajemen. Dengan melihat kondisi tersebut, media massa atau pers kemudian bukan sekedar lembaga komunikasi yang sifatnya massal.

Menurut Ana Nadya Abrar (1995:45), media massa telah menjadi lembaga ekonomi, bahkan unit produksi. Yang menentukan dalam media massa tidak semata-mata berasal dari jurnalistik saja, tetapi juga dari manajer atau pemilik modal. Sehingga jangan kaget ketika beberapa koran terbit pada keesokan harinya, dengan *headline* yang sama, namun eksekusi

beritanya menjadi berbeda.

Dalam pemberitaan, tentunya banyak masalah yang ada di masyarakat dan pemerintah yang sedang berjalan, dan salah satunya adalah berita politik. Kita harus mengakui bahwa langsung atau tidak langsung, isu politik mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat karena setiap orang akan tertarik dengan berita politik.

Indrawadi Tamin (2003:11) mengungkapkan bahwa politisi atau pejabat publik seringkali tidak menyadari efek dan ulah mereka. Padahal, ucapan, tindakan atau keputusan-keputusan yang mereka keluarkan sering berdampak terhadap kehidupan orang banyak.

Berbagai kepentingan yang menyangkut hajat orang banyak seperti yang disebutkan dalam UUD 1945, tidak terlepas dari berbagai pihak, mulai dari partai politik yang mengaku sebagai wakil rakyat di gedung DPRD hingga pemerintah (daerah) sebagai penentu kebijakan sehingga wartawan harus memiliki profesionalisme dan keberpihakan pada korban kebijakan politik tidak dapat dilepaskan begitu saja karena terbuai oleh tawaran kepentingan ekonomi atau lebih dikenal dengan istilah *sogokan*.

Ia harus menanggulangi banyak konflik yang muncul bersamaan dengan perubahan yang disebabkan oleh pergesekan kepentingan politik. (Suranto, Hanif dan Dick Lopulalan. 2002:38)

Munculnya Keputusan Presiden atau KEPPRES Nomer 86/P Tahun 2008 tertanggal 7 Oktober 2008 tentang perpanjangan masa jabatan GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR DIY maksimal 3 tahun oleh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan fakta yang perlu diberitakan kepada masyarakat.

Novel Ali (1999: 144) menjelaskan bahwa isu politik memang merupakan salah satu hak rakyat sehingga baik pemerintah maupun rakyat itu sendiri harus semaksimal mungkin menghilangkan kesan luntarnya hak politik rakyat tersebut. Sebab samanya hak politik rakyat dapat menyebabkan kebekuan politik .

Dalam isu politik seperti berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang telah menjabat selama dua periode, muncul pertentangan atau konflik untuk tetap melanggengkan kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paduka Paku Alam IX maupun mendorong proses demokrasi dengan pemilihan langsung Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang baru.

Saat konflik muncul, media massa akan melakukan berbagai eksekusi dalam setiap pemberitaan yang nantinya akan membentuk sebuah *public opinion* dan kecenderungan sikap tersendiri. Untuk Yogyakarta, maka opsinya adalah Penetapan atau Pemilihan.

Hal inilah yang memungkinkan media massa untuk menguasai dan memenangkan konflik yang muncul, sedangkan terbentuknya kecenderungan tertentu terhadap masalah sehingga berkaitan dengan pandangan media dan frekuensi atau intensitas liputannya.

Kecenderungan tersebut juga dipengaruhi oleh keinginan pemilik modal untuk meningkatkan daya jual media yang dimilikinya. Sadar atau

tidak, pemilik modal sering mencampuri bidang redaksional, bahkan tidak jarang pemilik modal yang mengatur redaksional. (Abrar. 1992 : 30)

Dari beberapa media lokal khususnya koran yang ada di Yogyakarta, penulis lebih cenderung memilih Jawa Pos Radar Jogja yang mampu menyajikan berita-berita politik lokal, walaupun semua informasi yang ada di lapangan belum mampu dituangkan dalam bentuk tulisan berita.

Untuk mempermudah dalam proses analisis berita politik dalam sebuah surat kabar, maka surat kabar dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu bagian muka, bagian dalam, dan bagian belakang.

Pada umumnya, bagian depan yang kemudian lebih dikenal dengan halaman utama, banyak memberikan porsi berita yang menjadi sorotan atau kejadian utama yang mampu menarik minat pembaca, sehingga mendapatkan perlakuan khusus dari redaksi.

Seperti yang telah disebutkan di awal, kejadian utama tentu mendapatkan perlakuan khusus berupa judul dengan font yang besar dan mendapatkan porsi kolom yang lebih luas dibandingkan dengan berita utama lainnya.

Tentunya, surat kabar dalam memilih berita atau isu yang nantinya menjadi bagian utama, melalui proses yang disebut dengan istilah *content analysis*, atau berupa seleksi berita dan penempatannya, seberapa banyak pemunculannya, dan porsi yang akan diberikan pada berita tertentu.

Jalaludin Rahmat (1985: 69) menjelaskan bahwa peneliti agenda

media dengan analisis isi yang kuantitatif atau peneliti menentukan batas waktu tertentu, mengkodekan berbagai isi media dan menyusun isi itu berdasarkan panjang (waktu dan ruang), penonjolan (ukuran *headline*, lokasi surat kabar), frekuensi pemunculan, posisi surat kabar dan konflik.

Secara sederhana, untuk mengetahui betapa pentingnya sebuah isu atau berita dalam surat kabar dilihat frekuensi pemunculan dan porsi kolom dalam sebuah halaman yang diberikan, baik dalam periode harian, selama seminggu, hingga munculnya liputan khusus sebuah media.

Jawa Pos Radar Jogja sendiri, *banner headline* seringkali muncul di kanan atas atau di tengah halaman, namun bukan berarti halaman-halaman lainnya tidak memiliki unsur penting dalam rangkaian sebuah surat kabar.

Untuk mengetahui bagaimana porsi dan tata letak yang ada di radar Jogja, peneliti akan menjelaskannya secara runtut pada Bab II.

E. KERANGKA KONSEP

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989: 34) dalam bukunya *Metode Penelitian Survei*, menggambarkan bahwa peranan konsep dalam sangat besar karena dia adalah yang menghubungkan dunia teori dan dunia observasi, antara abstraksi dan realitas. Dalam penelitian sosial perannya menjadi bertambah penting karena “realistas” sosial yang menjadi perhatian ilmu sosial banyak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera

manusia sehingga sering timbul masalah dalam pengukuran konsep tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menyajikan kecenderungan analisis isi berita jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai dwi tunggal Gubernur dan Wakil Gubernur DIY di Harian Radar Jogja Jawa Pos Periode September-Oktober 2008. Selanjutnya penulis akan membagi unit analisis dan kategori sebagai berikut:

Tabel 1. Unit Analisis dan Kategorisasi

No	Unit Analisis	Kategori
1.	Kecenderungan Sikap Dukungan	a. Penetapan b. Pemilihan c. Netral
2.	Distribusi Halaman	a. Halaman 1 b. Halaman 2 c. Halaman 3 d. Halaman 4 e. Halaman 5 f. Halaman 6 g. Halaman 7 h. Halaman 8 i. Halaman 9 j. Halaman 10 k. Halaman 11 l. Halaman 12 m. Halaman 13 n. Halaman 14 o. Halaman 15 p. Halaman 16
3.	Nilai Berita	a. Tinggi b. Sedang c. Rendah
4.	Panjang Berita	a. Sangat Panjang b. Panjang c. Sedang d. Pendek

		e. Pendek Sekali
5.	Narasumber Berita	a. Pejabat Negara b. Pegawai Pemerintah c. Masyarakat Awam d. Anggota Dewan e. LSM f. Fungsionaris Partai g. Akademisi h. Pengusaha i. Praktisi j. Kerabat Keraton

1. Kecenderungan sikap dukungan

Kecenderungan tersebut dapat terlihat dengan munculnya wacana mengenai proses tahapan dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus kecenderungan sikap dukungan yang ada, berupa pemberitaan surat kabar yang memilih tetap pada *status quo* atau demokratisasi.

2. Distribusi Halaman

Distribusi halaman lebih pada penempatan berita pada halaman yang ada dalam surat kabar tertentu.

3. Nilai Berita

Berita yang biasanya dituju langsung oleh para pembaca pasti menarik pembaca dan untuk menarik pembaca, maka harus mengandung unsur-unsur nilai berita yang lengkap sehingga layak dibaca.

4. Panjang Berita

Semakin panjang berita yang memuat suatu wacana jabatan Gubernur dan Wagub DIY dapat diasumsikan menunjukkan kecenderungan sikap tertentu dari pihak penerbit.

5. Narasumber berita

Bisa diamati dari jabatan atau pekerjaan orang-orang yang dominan berperan dalam peristiwa atau menjadi sumber informasi dari sebuah berita.

F. OPERASIONAL KONSEP

1. Berita

Pengertian berita dalam penelitian ini adalah laporan tentang sebuah peristiwa (Abrar. 1995 : 3). Sehingga sebuah peristiwa yang tidak dilaporkan dan muncul sebagai realitas media tidak akan menjadi berita.

2. Media Massa

Media Massa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pers dalam pengertian sempit yaitu meliputi segala bentuk barang cetakan, seperti surat kabar, majalah, brosur, pamphlet dan barang-barang cetakan lainnya yang ditunjukkan untuk menyalurkan komunikasi massa. (Meinanda. 1981 : 40)

3. Kecenderungan Sikap Dukungan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1989 : 161) menjelaskan bahwa kecenderungan berarti kecondongan. Dalam penelitian ini kecenderungan sikap dukungan adalah kecondongan media massa

menampilkan fakta-fakta sosial yang disajikan melalui pemberitaannya.

Beberapa berita menyebutkan tentang perpanjangan masa jabatan dengan penetapan untuk Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX, serta berita-berita lain yang menginginkan proses demokrasi terjadi di Yogyakarta dengan melakukan pemilihan langsung muncul secara bersamaan dalam satu liputan pemberitaan. Selanjutnya masing-masing dilihat kecenderungan sikap dukungannya dari isi beritanya, apakah pro atau kontra.

Berita pro adalah berita mencerminkan dukungan positif berupa upaya penetapan kembali kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada. Sedangkan pemaknaan terhadap berita kontra bila isi berita mencerminkan dukungan negatif terhadap tokoh tersebut atau meminta adanya pemilihan langsung.

Walaupun wacana kemunculan tokoh lain untuk menjabat sebagai pengganti Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada tahun 2008 belum muncul, tentunya berkaitan dengan frekuensi pemuatan setiap wacana yang ada dalam berita sekaligus kecenderungan sikap dukungannya yakni berkaitan dengan isi pemberitaan terhadap wacana penetapan atau pemilihan.

4. Distribusi Halaman

Seperti disebutkan di muka, penempatan berita di sebuah halaman dibagi dalam tiga kategori. Yakni halaman muka, tengah dan belakang.

Semakin tinggi nilai dan pentingnya berita itu, maka berita itu akan ditempatkan di halaman muka. Ini dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca.

5. Nilai Berita

Variabel ini dapat dilihat dari jumlah unsur nilai berita yang terkandung dalam sebuah berita. Definisi nilai berita media massa pada umumnya mengandung sejumlah unsur, di antaranya: penting, waktu, dekat, besar, aktual, konflik, unik hingga manusiawi. Dengan demikian, untuk mengukur variabel tingkat kelengkapan berita yang dimuat tentang berakhirnya masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alama IX adalah:

- a. Tinggi (mempunyai 7 hingga 8 unsur berita)
- b. Sedang (mempunyai 4 hingga 6 unsur berita)
- c. Rendah (mempunyai 1 hingga 3 unsur berita)

Untuk mengukur lengkap tidaknya berita dengan menghitung jumlah unsur nilai berita yang terkandung dalam suatu berita kemudian dicocokkan dengan kriteria tersebut.

Agar suatu berita itu dapat menarik perhatian pembaca, maka dalam berita mengandung unsur-unsur nilai berita sehingga isi berita menjadi lengkap dan layak dibaca.

6. Panjang Berita

Tingkatan yang menunjukkan panjang pendeknya pemberitaan dilihat dari jumlah paragraf yang ada pada berita. Semakin panjang suatu

berita yang memuat berita wacana masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dapat diasumsikan menunjukkan kecenderungan dari sikap surat kabar tersebut.

- a. Sangat panjang (21 paragraf atau lebih)
- b. Panjang (16 hingga 20 paragraf)
- c. Sedang (11 hingga 15 paragraf)
- d. Pendek (6 hingga 10 paragraf)
- e. Pendek sekali (1 hingga 5 paragraf)

(Abrar. 2005: 34)

7. Narasumber Berita

Dilihat dari jabatan atau profesi orang yang dijadikan narasumber dari sebuah berita.

- a) *Pejabat negara* adalah mereka yang menduduki jabatan di struktur lembaga-lembaga negara seperti lembaga eksekutif dan yudikatif. Misalnya Presiden dan Wakil Presiden RI, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Bupati, Hakim, Polisi dan Jaksa.
- b) *Pegawai pemerintah* adalah mereka yang bekerja sebagai staf pemerintah.
- c) *Masyarakat awam* adalah masyarakat biasa yang tidak menduduki posisi pemerintah maupun aktif di organisasi LSM.
- d) *Anggota dewan* adalah mereka yang duduk di lembaga legislatif atau sebagai anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipilih berdasarkan hasil Pemilu 2004.
- e) *LSM* adalah mereka yang aktif di organisasi non pemerintah.
- f) *Fungsionaris partai* adalah mereka yang menduduki jabatan

struktural di partai-partai politik hasil Pemilu 2004.

- g) *Pengusaha* adalah mereka yang bergerak dan menekuni kegiatan di berbagai bidang usaha di luar pemerintahan.
- h) *Akademisi* adalah mereka yang berada di lembaga pendidikan dan memiliki ketertarikan terhadap proses demokrasi yang ada di Yogyakarta.
- i) *Praktisi* adalah mereka yang bekerja di lembaga independen dan sebagai pakar yang bekerja di bidangnya masing-masing.
- j) *Kerabat Keraton* adalah mereka yang masih memiliki hubungan darah serta kekerabatan dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alama IX berada di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alam

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Mohammad Nazir menjelaskan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. (Nasir. 2005: 54)

Pelaksanaan metode ini tak terbatas pada pengumpulan data saja, tapi meliputi analisis dan interpretasi arti makna dan data itu sendiri.

Sedang analisis isi dipakai untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi berbentuk lambang atau pesan, karena pada dasarnya analisis isi digunakan untuk menganalisis kecenderungan isi suatu media massa.

Bambang Setiawan (2008) dalam artikelnya menyebutkan Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain.

Sementara itu, Krippendorf mengatakan analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat referensi-referensi yang dapat ditiru dan sah data dengan mempertahankan konteksnya/ (Krippendorf, 1993 : 15)

2. Obyek Penelitian

Penelitian diadakan di surat kabar Harian Radar Jogja Jawa Pos dan obyek penelitiannya adalah berita langsung yang diteliti sesuai unit analisis dan kategori yang telah ditetapkan berupa berita yang dimuat di Harian Radar Jogja periode tanggal 1 September hingga 31 Oktober 2008. Pemilihan Harian Radar Jogja lebih pada pertimbangan Koran yang orientasi peliputan berupa berita-berita lokal di Yogyakarta.

Dalam kurun dua bulan tersebut ada sebanyak 51 berita yang secara khusus membahas mengenai Keistimewaan DIY dan peneliti menggunakannya semua sebagai suatu populasi yang utuh. Suharsimi Arikunto (1986 : 107) dalam bukunya menjelaskan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Aspek lainnya yang menjadi pertimbangan penulis adalah pada aksesibilitas data dan lokasi kejadian peristiwa tersebut berlangsung. Sedangkan pemilihan waktu pada tanggal 1 September hingga 31 Oktober 2008, lebih pada periode saat para wakil rakyat DPRD DIY melakukan berbagai langkah politis untuk mendapatkan regulasi formal dalam kejelasan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang dapat berlangsung langgeng.

Massa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sendiri secara resmi berakhir pada 8 Oktober 2008, dan peneliti ingin mengetahui isi pemberitaan yang muncul di Radar Jogja baik sebelum dan pasca tanggal 8 Oktober 2008.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang jelas digunakan oleh peneliti adalah melalui studi pustaka dengan meneliti naskah-naskah dokumen dari Harian Radar Jogja dalam bentuk berita di media cetak.

4. Teknik Analisis Data

Teknik penelitian ini menggunakan teknik analisis isi sebagai teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak (manifest). (Kreppendorff. 1993 : 16)

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kuantitatif, yaitu melakukan pengkajian dari apa yang tercetak dalam koran dan diamati untuk selanjutnya memberikan interpretasi pada obyek penelitian.

